



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Idiomatis Sekolah Gratis
Tanggal : Selasa, 03 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Putusan Mahkamah Konstitusi, 27 Mei 2025, yang tiba-tiba menggaungkan kata "gratis" untuk semua sekolah SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, seolah gempa bumi berskala tinggi, sangat mengguncang, terutama bagi perguruan swasta yang memiliki sekolah SD dan SMP.

Dalam percaturan politik, terutama selama masa kampanye pemilu, masyarakat sudah sangat sering mendengar kata gratis (umumnya berkaitan dengan pendidikan). Di beberapa daerah, kebijakan itu juga telah dilaksanakan. Meskipun begitu, putusan MK baru-baru ini sungguh menggetarkan karena sifat final dan mengikatnya.

Berharap guncangannya tak kian luas, rasanya penting merenungkan kembali makna kata "gratis" yang ternyata selama ini menjebak banyak pihak.

Sekolah yang menerima predikat gratis akan terjebak dan nyaris tak dapat berbuat apa pun, lebih-lebih bila akan memungut iuran dari orangtua siswa untuk kepentingan mendesak. "Gratis kok masih akan meminta iuran siswa?", begitu suara yang akan muncul.

Pihak pemerintah daerah juga akan mengalami keterjebakan regulatif, terutama bila ada satuan pendidikan dianggap melanggar implementasi idiom gratis, seperti jika sekolah mengadakan studi banding ke luar pulau, bahkan ke luar negeri.

Lelahanan

Gratis, dalam bahasa Jawa bermakna lelahanan, tanpa bayar. Tentu maksudnya tak harus membayar bagi penerima barang. Misal, makan siang gratis. Itu artinya mereka yang menikmati makan siang itu, menerimanya secara cuma-cuma (gratis). Padahal, sebenarnya, yang mengajak makanlah yang bayar ke pemilik rumah makan.

Kita juga mengenal ada pepatah bahasa Inggris: tidak ada makan siang gratis (*no free lunch*). Padahal, sejatinya pasti ada saja yang membiayainya.

Dalam konteks ada keterkaitan dan hubungan antara pemberi dan penerima semacam inilah, kata gratis menempatkan pemerintah sebagai pemberi nan murah hati dan warga masyarakat sebagai penerima, penikmat, sabar menanti, menggantungkan, berserah diri.

Masyarakat menjadi semacam lahan yang siap diolah, siap ditanami, dan proses seperti itulah yang disebut lelahanan, serba terbuka dan siap menerima apa saja, dari siapa pun dan tentang apa pun. Masyarakat agraris menghayati kehidupan seperti lahan terbuka tadi, siap menerima yang serba gratis itu dengan penuh sukacita dan berharap terus.

Tegasnya, apa saja yang serba lelahanan, serba tidak membayar, pasti ditanggapi sebagai pemberian gratis dari pemerintah. Dalam arus kuat seperti ini, mentalitas masyarakat terus-menerus akan semakin rentan, tidak tahan uji, tidak pula gigih memikirkan pendidikan anak-anak keturunannya karena sudah dibiayai oleh pemerintah.

Menggerus mentalitas

Sikap dasar masyarakat bercorak agraris seperti itu menjadi kian subur oleh berbagai bahasa/ungkapan kebijakan pembangunan manusia yang secara jelas menggunakan idiom gratis. Seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, sembako gratis, dan sebagainya.

Bahkan ketika kebijakan itu masuk dalam regulasi daerah, ungkapan sekolah gratis menjadi semakin idiomatis bagi masyarakat yang tahunya menyekolahkan anak tidak bayar apa pun, tidak dipungut biaya apa pun, oleh pihak sekolah.

Putusan MK agar pemerintah menggratiskan—dalam arti tidak memungut biaya bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta—bukan saja membuat idiomatis sekolah gratis menjadi berskala nasional, tapi juga akan mendorong terjadinya penggerusan mentalitas masyarakat yang kian meluas.

Begitu mendengar kata sekolah (baca pendidikan), orangtua di mana pun, dikhawatirkan akan bersikap "betapa nikmatnya, tidak perlu memikirkan biaya sekolah anak-anak". Bahkan, tidak mustahil, nantinya mereka juga akan menuntut agar sekolah anak-anaknya di bangku SMA dan perguruan tinggi juga digratiskan.

Gerusan mentalitas masyarakat yang mengarah pada sikap "tidak perlu pusing-pusing memikirkan pendidikan anak" karena ternabobokan oleh idiom gratis, mengancam dan sudah berada di depan mata kita. Oleh karena itu, alangkah bijaksananya bila kita semua sepakat untuk mengganti kata gratis dengan ungkapan lain.

Ungkapan yang di satu sisi harus menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi di sisi lain pembangunan manusia (baca: pembangunan masyarakat) juga semakin menggambarkan kualitas daya tahannya.

Kata kemitraan (*partnership*) mungkin lebih tepat digunakan untuk menggantikan kata "gratis", terutama mengingat betapa seharusnya masyarakat perlu selalu bermitra dengan pemerintah dalam hal apa pun.

JC Tukiman Taruna *Pengajar Pascasarjana pada Program Penyuluhan Pembangunan UNS dan Program Doktor Ilmu Lingkungan SCU Semarang*